



Jumat, 22 Januari 2016 06:00

Pencairan Dana Desa di Malra Pakai Uang “Pelicin” Rp 3,7 Juta



TUAL - Pengelolaan dana desa, di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), dikabarkan amburadul. Banyak Kades (Kepala Desa), yang telah melakukan pencairan desa tahun 2015, digunakan tidak tepat sasaran. Sudah begitu ada dana pelicin ketika pencairan dilakukan para Kades.

Data Kabar Timur yang berhasil dihimpun menyebutkan, dana “pelicin” pencairan dana desa itu, dipatok Rp 3.750 perdesa. Jumlah Desa di Kabupaten Malra, tercatat sebanyak 190 desa. “Ada yang setuju ada juga desa yang tolak membayar pelicin itu,” ungkap salah satu staf Desa kepada Kabar Timur di Tual, kemarin.

Kendati begitu, kata dia, rata-rata Kepala Desa, menyetujui adanya patokan dana pelicin yang telah ditetapkan Pemdes di Kabupaten Malra. “Ya, kalau proses tidak bertele-tele dan mulus, dana pelicin harus mau disetor. Tapi, kalau tidak sudah pasti prosesnya bertele-tele,” sebut dia.

Menurut dia, Kabupaten Malra memiliki sebanyak 190 desa, dari ratusan desa itu, yang memiliki Kepala Desa definitif berjumlah kurang lebih 20 desa dan sisanya belum. “Ya kurang lebih 20 Kdesa defnintif. Sisanya masih berstatus penjabat,” bebarnya.

Kebanyakan, kata dia, Desa yang masih dipimpin seorang penjabat ini yang kerap merestui adanya pemotongan dana pelicin. “Mau bagaimana lagi, semua rancangan program desa dibuat bagi Pemdes. Tapi, kalau mau jujur pengelolaan dana desa tahun 2015, lalu amburadul,” terangnya.

Untuk menjaga, penyalagunaan di tahun 2016, perlu dilakukan pengawasan ketat dari aparaturnya penegak hukum. “Ya harus diawasi dan bila perlu diusut dana desa di tahun 2015 itu. Disitu baru bisa diketahui siapa-siapa saja Kades atau pejabat desa yang terlibat,” bebarnya.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Sayangnya, hingga berita ini naik cetak Pemdes Pemkab Malra, belum dapat dikonfirmasi seputar dana pelicin yang diwajibkan disetor desa itu. Namun, sumber di Pemdes sendiri, kepada Kabar Timur, membanarkan adanya pemotongan dana desa sebesar Rp 3.759 ribu, perdesa. **(SKT)**



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Jumat, 22 Januari 2016 06:00

Provinsi Tenggara Raya Sangat Memenuhi Syarat

AMBON - Keinginan masyarakat Tenggara Raya agar daerah itu menjadi provinsi, terus disikapi. Ini karena wilayah itu memenuhi syarat dan masuk kawasan strategis nasional.

“Terkait dengan pemekaran Provinsi Tenggara Raya ini sudah disuarakan masyarakat sudah cukup lama. Sehingga ketika bicara tentang pembahasan 13 Daerah Otonom Baru (DOB) di Maluku sudah dibicarakan Provinsi Tenggara Raya,”kata anggota Komisi A DPRD Maluku, Amir Rumra kepada Kabar Timur, kemarin.

Menurut dia, amanat UU 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah secara tegas mengatur itu. “Kita bicara sisi kelayakan Tenggara Raya memenuhi syarat, karena secara administratif sudah ada 5 kabupaten/kota, yakni Maluku Tenggara, Kota Tual, Aru, MTB, dan MBD. Semuanya termasuk dalam daerah perbatasan. Dalam pasal 49 UU 23 tahun 2015 menyebutkan kawasan strategis nasional. Nah, Tenggara Raya ini masuk kawasan strategis karena berbatasan dengan sejumlah negara. Yang suka tidak suka mesti mekar. Daerah ini berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Jadi secara administrative UU nomor 31 UU 23 juga terpenuhi dan memenuhi syarat. Apalagi lima kabupaten/kota itu umurnya diatas lima tahun,”paparnya.

Tak hanya itu, politisi PKS dari daerah pemilihan Malra, Aru, dan Kota Tual menyebut, sesuai Perpres 33 tahun 2014 tentang kawasan strategis nasional, Tenggara Raya masuk didalamnya.”Mudah-mudahan pemerintah pusat lewat Presiden Jokowi yang ingin menjadikan daerah perbatasan menjadi garda terdepan NKRI,”harapnya.

Ketua Fraksi PKS ini juga berharap, pemekaran Tenggara Raya agar membuka keterisolasian dan mengurangi kemiskinan di daerah itu.” Termasuk soal kemiskinan karena transportasi kita. Kita tidak bisa jawab dengan kondisi APBD kita yang minim. Kondisi kesulitan wilayah yang rumit. Ini bicara kebijakan besar. Provinsi Tenggara Raya kalau disuarakan masyarakat kenapa tidak. Dan itu kami diskusikan sudah lama,”terangnya.

Diakuinya, ketika Komisi A bertemu dengan Komisi II pihaknya sudah menyampaikan rencana pemekaran Tenggara Raya.” Mudah-mudahan grand desain penataan nasional pemekaran daerah kabupaten/kota dan provinsi Tenggara Raya juga masuk. Jadi tidak serta diusulkan lewat bawah, bisa saja langsung ke pusat. Ini karena daerah perbatasan. Mudah-mudahan teman-teman komisi II maupun DPD diskusikan masuk grand desain. Apalagi grand desain sementara disusun. Terkait penataan wilayah, pasti daerah perbatasan mejadi prioritas,”sebutnya..

Dia kuatir, jika Tenggara Raya tidak dimekarkan sejumlah wilayah di Tenggara Raya di caplok Australia atau Timor Leste.” Ini kawasan terdepan. Pulau terluar juga diawasi dan dikawal dengan baik. Bisa saja di caplok Timor Leste dan Australia pulau-pulau dan potensi Migas dan



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

pertambangan yang ada sana. Jadi memang saatnya Tenggara Raya
dimekarkan,"pungkasnya. (KTM)